KATA PENGANTAR

INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Sesuai rancangan Renstra BBPP Batangkaluku 2015 - 2019, Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh BBPP Batangkaluku pada tahun 2015 - 2019, adalah : (1) Meningkatnya kualitas program, pemantauan, evaluasi, pengendalian diklat pertanian; (2) Pengembangan jejaring kerjasama dan sistem informasi diklat; (3) Optimalnya kualitas pelayanan pelaksanaan diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan dan mekanisasi pertanian; (4) Meningkatnya kualitas pelayanan pelaksanaan diklat profesi dan pelaksanaan uji kompetensi bidang pertanian; (5) Mengembangkan model teknik diklat, diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan mekanisasi pertanian; (6) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan diklat pertanian, swadaya sebagai lembaga diklat pertanian di perdesaan; (7) Meningkatkan fungsi Inkubator Agribisnis sebagai media pembelajaran agribisnis.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2018 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian pada tahun 2018

Kepala Balai,

Ir. Kemal Mahfud, MM
NIP : 19610225.198903.1.001

DAFTAR ISI

hal

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Lampiran iii

I. **PENDAHULUAN** 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Dasar Hukum 3

C. Tugas Pokok dan Fungsi.....4

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 6

A. Visi 6

B. Misi 6

C. Tujuan 7

D. Sasaran Strategis 8

III. PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018 11

A. Perencanaan Program dan Kegiatan 2018 11

IV. PENUTUP 12

A. Penutup 12

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mandat Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, adalah melaksanakan tugas-tugas peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian baik bagi aparatur maupun baginon aparatur pertanian melalui pendidikan dan pelatihan. Aparatur pertanian adalah profesibagi pegawai negeri sipil danpegawai pemerintah di sektor pertanian dengan perjanjian kerja, danbekerja pada instansi pemerintah, sedangkan non aparatur pertanian (petani/pekebun/peternak) adalah perorangan warga negara Indonesia besertakeluarganya ataukorporasiyang mengelola usaha dibidang pertanian.

Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme bagi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku telah dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, diantaranya melalui diklat-diklat berbasis kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatan yang dipangku, berdasarkan Permentan Nomor: 49/Permentan/OT.140/9/2011, yaitu, Diklat bagi aparatur dan non aparatur pertanian, diklat bagi aparatur meliputi diklat fungsional, diklat teknis pertanian, dan diklat kewirusahaan, sedangkan diklat bagi non aparaturmeliputi Diklat kepemimpinan, kewirausahaan, serta diklat teknis komoditas pertanian.

Dalam menyikapi tuntutan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang jumlahnya sangat besar, khususnya bagi pelaku (non aparatur) pertanian, semenjak tahun 2006 sampai sekarang 2016, BBPP Batangkaluku telah menumbuh kembangkankan 102 (seratus dua)unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar pada 6 (enam) Provinsi se-Sulawesi (Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng, Sulut, dan Gorontalo). Pengelola P4S adalah para petani maju dan berhasil yang diharapkan dapat metransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada petani sekitarnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat mendorong percepatan

kebutuhan tuntutan peningkatan kapasitas SDM petani yang dilaksanakan melalui kegiatan permagangan/pelatihan.Pembinaan terhadap P4S selama ini yang telah dilakukan berupa mengikut sertakan kegiatan Diklat teknis agribisnis, manajeman, Instruktur, dan metodologi pelatihan bagi pengelola P4S, pemberian fasilitasi pendanaan/sharing kegiatan permagangan di P4S, serta pemberian sarana pendukung permagangan/pelatihan.

Demikian pula terhadap SDM aparatur bidang pertanian, pelaksanaan diklatnya juga telah berusaha disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan kompetensi yang diharapkan, berbagai diklat teknis dan fungsional yang dilaksanakan baik biaya yang berasal APBN maupun biaya yang berasal dari pihak user (kerjasama pengguna jasa diklat), dilaksanakan dengan pengembangan pola dan metoda diklat, walaupun itu belum sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sasaran, sebagai tindak lanjutnya akan terus dikembangkan sehingga kedepan akan dimilikiya pilihan alternative model pelatihan yang dapat melingkage dan mensinergikan program pusat dan daerah, sekaligus menjadi media sinkronisasi program pusat dan daerah.

Selanjutnya berkaintan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain : proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja.

Dalam SAKIP, dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau terget kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi

anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIN.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan BBPP Batangkaluku.

Dalam rangka perencanaan kinerja pembangunan pertanian TA.2018, maka disusunkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian Pertanian Tahun 2018.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT BBPP Batangkaluku Tahun 2018 adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tAHUN 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
d. Surat Keputusan LAN nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Permentan Nomor 106/ Permentan/ OT.140/10/2013, tanggal 9 Oktober 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, mempunyai Tugas Pokok "**melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian**".

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan antara lain:

1) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama
2) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan
3) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian
4) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur
5) Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri
6) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur
7) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian
8) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian
9) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian
10) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya
11) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian

12) Pelaksanaan bimbingan lanjutan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur
13) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur
14) Pengelolaan Unit Inkubator Usaha Tani
15) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan dibidang pertanian
16) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan,
17) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis
18) Pengelolaan urusan kepegawaian , keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Batangkaluku.

Berdasarkan Permentan tersebut diatas, bahwa Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan sehari hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Visi merupakan sebuah gambaran tentang masa depan dimana sebuah organisasi akan berada. Visi juga menjelaskan apa yang akan terjadi atau dicapai oleh sebuah organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Visi akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan Perubahan lingkungan strategis pembangunan pertanian baik nasional maupun internasional .

Dengan mengacu kepada tujuan pengembangan sumberdaya manusia pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian serta mencermati dinamika lingkungan strategis pembangunan pertanian , maka Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku merumuskan ***Visi*** sebagai berikut :

"Menjadi lembaga pelatihan terpercaya dan berdaya saing untuk menghasilkan SDM pertanian yang kreatif, inovatif dan professional."

B. Misi

Untuk mewujudkan visi, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku menetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2014-2019. Misi Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku adalah **:**

1. Meningkatkan kualitas program, pemantauan, evaluasi, pengendalian diklat pertanian
2. Mengembangkan jejaring kerjasama, dan sistem informasi diklat pertanian
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan mekanisasi pertanian
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan diklat profesi dan pelaksanaan uji kompetensi bidang pertanian
5. Mengembangkan model teknik diklat, diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan mekanisasi pertanian
6. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan diklat pertanian, swadaya sebagai lembaga diklat pertanian di perdesaan
7. Meningkatkan fungsi Inkubator Agribisnis sebagai media pembelajaran agribisnis
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana teknis, administrasi dan manajemen BBPP

C. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi organisasi secara terperinci, jelas, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil kegiatan. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur secara kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kegiatan pada masa mendatang. Untuk itu. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mengefektifkan rencana program, pemantauan, evaluasi dan pengendalian diklat pertanian
2. Memantapkan keberlanjutan kerjasama, jejaring kerja, dan sistem informasi diklat pertanian.
3. Mengoptimalkan kualitas pelayanan pelaksanaan diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan dan mekanisasi pertanian.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan diklat berbasis kompetensi dan profesi sekaligus pelaksanaan uji kompetensi bidang pertanian
5. Mengembangkan teknik dan metode pelaksanaan diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan mekanisasi pertanian
6. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan diklat pertanian swadaya sebagai lembaga diklat pertanian di perdesaan
7. Meningkatkan fungsi Inkubator Agribisnis sebagai media pembelajaran agribisnis
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana teknis, administrasi dan manajemen BBPP

D. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan indikator kinerja suatu lembaga dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Batangkaluku pada tahun 2015 - 2019 akan melakukan 4 (empat) kegiatan utama yang terdiri dari :

1. **Meningkatnya kualitas program, pemantauan, evaluasi, pengendalian diklat pertanian**
   a) Tersusunnya 1 dokumen rencana strategis (RENSTRA)
   b) Tersusunnya 25 dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian
   c) Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pengendalian Selama 5 tahun
   d) Tersusunnya 20 dokumen monitoring dan evaluasi pertanian
   e) Tersusunnya 10 (sepuluh) Standar Kompetensi Kerja Pertanian bagi aparatur maupun non aparatur pertanian

2. **Pengembangan jejaring kerjasama dan system informasi diklat**
   a) Meningkatkan promosi, publikasi dan sosialisasi kelembagaan pelatihan, kerjasama diklat, permagangan, operasional dan jasa pelayanan melalui berbagai media informasi di 6 provinsi
   b) Menyempurnakan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Diklat (termasuk standar pembiayaan diklat kerjasama)
   c) Menyusun panduan pembelajaran pertanian bagi generasi muda pertanian dan permagangan di BBPP Batangkaluku.

3. **Optimalnya kualitas pelayanan pelaksanaan diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan dan mekanisasi pertanian**
   a) Meningkatkan kompetensi 232 orang widyaiswara sesuai spesialisasi utamanya dalam mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian
   b) Meningkatkan kompetensi 124 orang tenaga kediklatan dan fungsional khusus lainnya secara proporsional
   c) Meningkatkan kompetensi 10.920 aparatur melalui diklat (diklat teknis, diklat fungsional) untuk mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian serta reformasi birokrasi yang responsive gender

d) Meningkatkan kompetensi 7.890 non aparatur melalui diklat teknis, diklat kepemimpinan dan manajemen, serta diklat kewirausahaan untuk mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian serta responsive gender
e) Tersusunnya 10 dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dihasilkan
f) Tersedianya sarana prasarana pelatihan berupa 614 unit peralatan dan mesin
g) Tersedianya sarana prasarana pelatihan berupa gedung dan bangunan
h) Tersedianya sarana prasarana pelatihan berupa 5 unit kendaraan operasional (bus)

4. Meningkatnya kualitas pelayanan pelaksanaan diklat profesi dan pelaksanaan uji kompetensi bidang pertanian

a) Menyelenggarakan Diklat Pertanian Berbasis Kompetensi sebanyak 700 orang
b) Melaksanakan Uji Kompetensi untuk sertifikasi kompetensi bidang pertanian bagi non aparatur sebanyak 700 orang
c) Pengelolaan Tempat Uji Kompetensi profesi (TUK)
d) Pengelolaan Lembaga Diklat Profesi (LDP)

5. Mengembangkan model teknik diklat, diklat fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan mekanisasi pertanian

a) Mengembangkan sistem metodologi pelatihan pertanian
b) Uji penerapan system/metodologi pelatihan pertanian
c) Sosialisasi/penyebaran system/metodologi pelatihan pertanian
d) Mengembangkan pola pembelajaran baik dikelas (teori) maupun dilapangan (praktek)

6. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan diklat pertanian, swadaya sebagai lembaga diklat pertanian di perdesaan

a) Pengelolaan sistem manajemen integrasi (SMI) ISO 9001-20015, SNI dan ISO 14001 – 20015
b) Melaksanakan audit (internal dan eksternal) dan pengembangan SOP sistem manajemen integrasi (SMI) ISO 9001-20015, SNI, dan ISO 14001 – 20015

c) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan evaluasi kinerja organisasi 20 kali
d) Melaksanakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian perdesaan swadaya (P4S) sebanyak 131 unit
e) Terfasilitasinya dan melaksanakan re-klasifikasi 131 unit P4S di 6 (enam) Provinsi Se Sulawesi
f) Terlaksananya pembinaan 6 unit FK-P4S di 6 (enam) Provinsi Se Sulawesi
g) Tersusunnya 5 dokumen ketenagaan pelatihan pertanian yang dihasilkan

7. Meningkatkan fungsi Inkubator Agribisnis sebagai media pembelajaran agribisnis

a) Mengembangkan unit usaha inkubator usaha tani/manajemen
b) Terlayaninya kegiatan konsultasi agribisnis terhadap mitra/tenant dan pemangku kepentingan lainnya

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

A. Perencanaan Program dan Kegiatan 2018

Program utama pembangunan pertanian merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kerja (PK)

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah : (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa *output*/keluaran maupun *outcome*/hasil, (3) indikator kinerja *output*/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) indikator *outcome*/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-1 dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja dilingkupnya. Program menghasilkan *outcome* . Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian *outcome* program.

BBPP Batangkaluku pada tahun 2018 melaksanakan 1 program yaitu Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian. Ukuran keberhasilan Eselon - II dalam menjalankan program tersebut diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*. Adapun rancangan program dan kegiatan tahun 2018 secara rinci disajikan pada tabel 1. sebagai berikut : (terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan BBPP Batangkaluku Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja (LAKIN)

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana yang disusun sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapainnya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator - indikator kinerja dari kegiatan berupa *output* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Pada tahun 2018 BBPP Batangkaluku melaksanakan 1 (satu) program peningkatan penyuluhan,pendidikan dan pelatihan pertanian serta 5 (lima) output guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran dan manfaat bagi kelompok sasaran diperlukan dalam perencanaan kegiatan pembangunan pertanian. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

RENCANA KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja : **Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku**

Tahun : **2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPP Batangkaluku	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publiK BBPP Batangkaluku	3.75 (skala likert)
2	Meningkatnya kualitas pelatihan pertanian	Penurunan rata – rata competency gap index peserta pelatihan pertanian	35.00%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPP Batangkaluku	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Batangkaluku yang terjadi berulang	0.00
		Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	0.00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPP Batangkaluku	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Batangkaluku	3.75 (Skala likert)
2	Meningkatnya kualitas pelatihan Pertanian	- Penurunan rata-rata competency-gap index peserta pelatihan pertanian	35.00%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPP Batangkaluku	- Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Batangkaluku yang terjadi berulang	0.00
		- Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015	0.00

LAMPIRAN

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN BBPP BATANGKALUKU TAHUN 2018
SATKER UPT PELATIHAN : BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU

NO	OUTPUT	SUBOUTPUT		SATUAN	FISIK	ANGGARAN (RP)
					T	PAGU
018.10.13	**Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian**					
1810	**Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian**					
1810.001	**Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian**			**Org**	**1721**	**6,218,284,000**
1810.001.110	**Pelatihan Kepemimpinan Pertanian Mendukung Reformasi Birokrasi**			**Org**	**210**	**1,026,970,000**
		A	Pelatihan Bagi Aparatur dan Non Aparatur	Org	180	886,300,000
		B	ATC	Org	30	140,670,000
1810.001.130	**Pelatihan Fungsional RIHP**			**Org**	**431**	**1,856,944,000**
		A	Pelatihan Dasar Fungsional Ahli Bagi PP	Org	30	144,684,000
		B	Pelatihan Dasar Fungsional Bagi PP dari THL	Org	401	1,712,260,000
1810.001.150	**Pelatihan Alsintan**			**Org**	**90**	**256,650,000**
		A	Pelatihan Teknis Tematik Alsintan	Org	90	256,650,000
1810.001.151	**Pelatihan Teknis Tematik Hortikultura**			**Org**	**150**	**535,660,000**
		A	Pelatihan Teknis Tematik Cabai	Org	80	239,560,000
		B	Pelatihan Teknis Tematik Bawang Merah	Org	70	296,100,000
1810.001.151	**Pelatihan Teknis Tematik Perkebunan**			**Org**	**220**	**734,800,000**
		A	Pelatihan Teknis Tematik Tebu	Org	40	141,200,000
		B	Pelatihan Teknis Tematik Kopi	Org	60	212,100,000
		C	Pelatihan Teknis Tematik Kakao	Org	80	240,100,000
		D	Pelatihan Teknis Tematik Kelapa	Org	40	141,400,000
1810.001.151	**Pelatihan Teknis Tematik Padi**			**Org**	**180**	**508,060,000**
		A	Pelatihan Teknis Tematik Padi	Org	150	423,500,000
		B	Pelatihan Teknis Tematik Padi Organik	Org	30	84,560,000
1810.001.151	**Pelatihan Teknis Tematik jagung dan Kedelai**			**Org**	**440**	**1,299,200,000**
		A	Pelatihan Teknis Tematik Jagung	Org	120	338,800,000
		B	Pelatihan Teknis Tematik Kedelai	Org	320	960,400,000
		C				
1810.003	**Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani**			**Unit**	**7**	**6,760,000,000**
101	P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	A	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	Unit	7	235,000,000
		B	Pembinaan, Pengembangan dan Penumbuhan P4S	Unit	7	75,000,000

NO	OUTPUT	SUBOUTPUT		SATUAN	FISIK	ANGGARAN (RP)
					T	PAGU
		C	Bimtek Komoditas Strategis bagi Petani di P4S/BP3K	Angkt	100	6,450,000,000
1810.006	**LAYANAN PROGRAM DAN KERJASAMA PELATIHAN YANG DIHASILKAN**					**1,725,169,000**
051	Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan Yang Dihasilkan	A	IKL	Keg	1	181,000,000
		B	Pengawalan dan Pendampingan UPSUS	Keg	1	502,500,000
		C	Pengembangan Kegiatan Program Kerjasama	Keg	1	220,000,000
		D	Survelance Audit ISO 9001:2015 dan 1S0 14001:2015	Pkt	1	117,500,000
		E	Akreditasi Kelembagaan Pelatihan	Pkt	1	55,000,000
		F	Pemantapan Sistem Pengendalian Internal	Keg	1	55,000,000
		G	Pengawalan GPPT	Keg	1	334,000,000
		H	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Keg	1	28,169,000
		I	Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Balai	Pkt	1	50,000,000
		J	Penyusunan Kegiatan dan Anggaran	Keg	1	110,000,000
		K	Administrasi Pelaksanaan Kegiatan	12	Bulan	72,000,000
1810.051	**LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)**					
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	A	Pengadaan Peraalatan dan Fasilitas Perkantoran	Layanan	1	**155,677,000**
1810.994	**LAYANAN PERKANTORAN**			Bulan	12	**9,468,976,000**
001	Layanan Perkantoran	A	Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	5,857,135,000
		B	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Bulan	12	3,611,841,000
	TOTAL					**24,328,106,000**